

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan meskipun memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya. Oleh karena itu masyarakat harus bisa membantu mengembangkan sumber daya alam yang ada sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membuat usaha sendiri yaitu membuat Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dapat membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur. Penyerapan ini akan berdampak secara signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran, sekaligus membantu pemerintah mengurangi pengangguran yang ada.

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, hanya Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang dapat bertahan dari krisis ekonomi tersebut. Bisa dikatakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah hadir sebagai penyelamat dalam membangkitkan perekonomian Indonesia. Setelah kejadian tersebut pemerintah meyakini bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menyadari hal tersebut pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap UMKM dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 sebagai payung hukum agar gerak UMKM menjadi leluasa (Wijaya, 2018:1-8). Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dijelaskan bahwa UMKM adalah usaha usaha perseorangan atau badan usaha dengan kriteria total asset dan total omset sebesar Rp 50.000.000 dan Rp 300.000.000 untuk usaha mikro; antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan antara Rp 300.000.000 samapi dengan Rp 2.500.000.000 untuk usaha kecil; dan antara Rp 500.000.000 samapi dengan Rp 10.000.000.000 dan antara Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 untuk usaha menengah (Ningtyas, 2017). Selain memberikan perhatian yang besar pemerintah juga memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memangkas tarif pajak. Pada tanggal 22 Juni 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan tarif pajak penghasilan (PPh) Final baru untuk UMKM, dari semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Kebijakan yang diambil berdasarkan masukan masyarakat diefektifkan per 1 Juli 2018. Tarif 0,5 persen dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) yang omzet nya samapai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Pemerintah berharap dengan beban pajak yang semakin kecil, pelaku UMKM dapat memiliki kemampuan

ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi (Kemenkeu, 2018).

UMKM bisa dikatakan menggerakkan sector riil, karena UMKM lebih berfokus pada pengembangan industry rumah tangga dan mendorong factor produksi dan konsumsi. Salah satu sector riil yang bergerak di bidang konsumsi adalah pembangunan usaha peternakan yaitu pembangunan yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, telur, meningkatkan pendapatan petani ternak, serta menambah devisa dan memperluas lowongan pekerjaan. Menurut Salam (2006) untuk mencapai pembangunan pertanian pada umumnya dan sektor peternakan khususnya, maka sebagai penunjang kebutuhan protein hewani yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia perlu diusahakan produktifitas yang maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani peternak. Peternakan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai strategis dan memiliki peran cukup penting dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Salah satu produk yang memiliki banyak manfaatnya dari peternakan adalah susu, susu dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat terutama bagi anak-anak usia pertumbuhan.

Di Indonesia sendiri daerah yang paling banyak menghasilkan produk susu adalah pulau jawa dari pada daerah lain, itu dikarenakan di luar pulau jawa masih belum tersedianya kapasitas industry dengan skala skala industry yang cukup daya saingnya. Karena untuk memulai peternakan sapi ini harus memiliki kondisi geografis, ekologi dan sumber daya sehingga susu yang dihasilkan akan maksimal. Meskipun pulau jawa paling banyak menghasilkan produk susu dari pada daerah lain di Indonesia, itu tidak serta merta memenuhi stok kebutuhan pasar dalam negeri. Sehingga Indonesia melakukan impor produk susu untuk menutupi kurangnya produksi susu dalam negeri sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri bisa tercukupi. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia hanya bisa memproduksi susu segar sekitar 909 ribu ton pada tahun 2018. Masih jauh dari kebutuhan dalam negeri sekitar 3,3 juta ton sehingga sisanya harus diimpor dari luar negeri. Dilihat dari hasil tersebut bisa diketahui masih kurangnya produksi susu dalam negeri sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan sesuatu terhadap kekurangan pasokan produksi susu seperti melakukan pembinaan manajemen didalam peternakan sapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produksi susu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Provinsi jawa timur merupakan sentra populasi sapi perah tertinggi di Indonesia, salah satu kabupaten di jawa timur yang juga mengembangkan sapi perah yaitu kabupaten jember, jumlah usaha peternakan sapi di jember bisa dibilang terus mengalami peningkatan. Di dalam lingkup usaha pasti ada persaingan, untuk bisa

bertahan tentu diperlukan adanya perencanaan dan kebijakan yang tepat dalam menjalankan usaha peternakan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan ekonomi (Putra, 2012). Dengan membuat catatan keuangan di peternakannya para peternak dapat mengetahui secara mendetail kondisi usahanya dan nantinya bisa membuat keputusan dan kebijakan yang tepat. Akan tetapi masih banyak peternakan yang tidak membuat sebuah catatan keuangannya dengan baik dan sederhana dikarenakan kurangnya pengetahuan para peternak dalam menyusun laporan keuangan. Kebanyakan para peternak hanya mencatat keuangan mereka seadanya saja tidak sesuai standar akuntansi yang ada. Padahal dengan adanya laporan keuangan yang baik bisa menjadi salah satu factor pendorong untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak bank atau dari para penanam modal yang dapat membantu mengembangkan usahanya.

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, peternakan sapi perah yang berada di jalan raung dusun klonceng, ajung, kabupaten jember ini telah memiliki 36 ekor sapi perah tetapi saat ini hanya 30 sapi saja yang dapat memproduksi susu. Disini pemilik menggunakan dasar pencatatan accrual basic, meskipun begitu laporan keuangan yang ada didalam peternakan ini masih sederhana. Hal ini dikarenakan pemilik tidak mengetahui cara-cara membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. karena ketidaktahuan itulah peternakan Bestcow belum ada penambahan modal karena investor tidak yakin akan laporan keuangan milik Bestcow. Padahal kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hanya saja pada kenyataannya, belum banyak pelaku UMKM yang sadar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Alasan yang banyak digunakan adalah karena ketidaktahuan atas kewajiban tersebut serta sulitnya untuk menyusun laporan keuangan karena factor sumber daya manusia. UMKM berharap mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi karena mereka tahu bahwa laporan keuangan memiliki banyak manfaat, misalnya memudahkan akses ke perbankan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Hanya saja kompleksitas dan minimnya pemahaman atas standar akuntansi keuangan (SAK) membuat mereka seringkali mengabaikan ketentuan tersebut. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyadari bahwa format laporan keuangan yang umum tergolong cukup rumit untuk disusun oleh pelaku UMKM yang kebanyakan kurang memahami tentang pencatatan akuntansi. Tahun 2016, IAI menyusun standar keuangan yang sederhana, yaitu Standar

Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) sehingga pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah. SAK EMKM mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:1) Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas public yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan UU 20 tahun 2018 yang berlaku di Indonesia.

Disini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, yang pertama penelitian dari Ismadewi, et al. (2017) yang berjudul penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada usaha ternak ayam boiler. Objek penelitian ini pada usaha ternak ayam boiler milik I Wayan Sudiarsa. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan proses penyusunan laporan keuangan usaha ayam boiler menyusun catatan keuangan berdasarkan pengetahuan pemilik yang hanya memahami akuntansi secara sederhana. Dan juga ada beberapa kendala yang dialami oleh usaha ayam boiler dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yaitu: factor SDM, tingkat kompetensi, dan lingkup organisasi yang kecil. Dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada usaha ayam boiler diketahui laporan laba rugi dengan jumlah laba Rp 89.548.100, laporan posisi keuangan dengan jumlah asset Rp 214.548.100 serta jumlah utang dan modal Rp 214.548.100.

Ningtyas (2017) meneliti tentang penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM pada UMKM bintang malam. Dari hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan UMKM bintang malam yang disusun peneliti berdasarkan SAK EMKM dalam neraca menunjukkan total asset Rp 869,585,400 jumlah liabilitas Rp 108,987,500 dan modal Rp Rp 760,592,900. Laba bersih menunjukkan Rp 75,815,000. catatan atas laporan keuangan yang menyajikan gambaran umum perusahaan, pernyataan bahwa penyusunan laporan menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan yang digunakan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dan disajikan dalam laporan keuangan UMKM Bintang Malam.

Rachmanti, et al. (2019) melakukan penelitian yang berjudul analisis penyusunan laporan keuangan UMKM batik jumpat dahlia berdasarkan SAK EMKM. Dari hasil penelitian menunjukkan UMKM batik jumpat dahlia belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan yakni hanya mencatat keluar masuknya kas, serta tidak mencatat seluruh kas asset yang dimiliki dan bukti-bukti transaksi yang terjadi selama periode tertentu tidak diarsipkan maupun dicatat keseluruhan hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, alasannya karena ketidaktahuan para pemilik UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Jadi mereka hanya menyusun laporan keuangan secara sederhana seperti keluar masuknya kas. Hal ini juga sama dengan apa yang dialami peternakan Bestcow dimana dalam mencatat laporan keuangannya masih sangat sederhana. Hal ini dikarenakan pemilik peternakan tidak mengetahui cara-cara membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Sehingga peneliti bermaksud ingin membantu usaha Bestcow dalam membuat laporan keuangannya sesuai dengan SAK EMKM yang nantinya dapat membantu mengetahui secara mendetail kondisi usahanya.

Berdasarkan uraian diatas bisa dilihat betapa pentingnya suatu kegiatan pelaporan keuangan bagi usaha peternakan sehingga perlu dilakukan penyusunan laporan keuangan yang baik. Pada penelitian ini akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Dengan tujuan untuk merancang system akuntansi sederhana yang dapat membantu dan mempermudah pemilik peternakan dalam membuat laporan keuangannya berdasar standar yang berlaku saat ini. Dengan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan SAK diharapkan para pemilik peternakan dapat mengevaluasi usahanya dan menggunakan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan bisa digunakan untuk kebutuhan pinjaman modal dalam memperbesar usahanya. Pada saat survei awal yang telah dilakukan peneliti, pemilik peternakan menginginkan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar agar kondisi keuangan yang ada di dalam peternakannya bisa diketahui secara lebih rinci dan pemilik bisa mengambil keputusan yang benar bagi perkembangan peternakannya. Dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul **“REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH BESTCOW DI KABUPATEN JEMBER”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana penyusunan laporan keuangan peternakan sapi perah Bestcow berdasarkan SAK EMKM?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk membantu menyusun laporan keuangan peternakan sapi perah Bestcow berdasarkan SAK EMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang bisa diambil bagi penelliti selanjutnya yaitu bisa memberikan referensi untuk menyusun laporan keuangan yang akan digunakan pada usaha peternakan.
2. Manfaat yang bisa diambil bagi peternakan yaitu bisa memberikan sebuah informasi laporan keuangan usaha yang akuntabel dan kredibel kepada pemilik peternakan.
3. Manfaat yang bisa diambil bagi akademik yaitu bisa menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima di bnagku perkuliahan sehingga kedepannya telah mempunyai pengalaman dalam menyusun laoran keuangan..
4. Manfaat yang bisa diambil bagi peneliti yaitu bisa memberikan tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM.